

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS SEJARAH DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)

Umbu TW Pariangu¹, Agatha Christana Mitan Lewar², Petrus Kase³

^{1,2,3} FISIP, Universitas Nusa Cendana

Correspondent author: umbu.umbupariangu@staf.undana.ac.id

Kupang, NTT, Indonesia

Abstract

The aim of this research is to determine the role of local government in preserving historical sites in order to optimize local revenue and what factors hinder the preservation of Taman Renungan Bung Karno as a historical site in Ende Regency. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of the research show that the role of local government in preserving historical sites at Taman Renungan Bung Karno in the aspects of motivator, facilitator and dynamist has not been carried out effectively. The government must be more active in carrying out innovations in promoting tourism and disseminating information regarding the Bung Karno Reflection Park through outreach activities and seminars. The government also needs to provide supporting infrastructure such as bathrooms/toilets which are vital tourist needs, repair damaged park facilities, including tightening supervision in the park.

Keywords: Local government; Preservation of historical sites; Role; Regional Original Income

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah dalam pelestarian situs sejarah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan faktor apa saja yang menghambat dalam pelestarian Taman Renungan Bung Karno sebagai Situs sejarah di Kabupaten Ende. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam pelestarian situs sejarah di Taman Renungan Bung Karno dalam aspek motivator, fasilitator maupun dinamisator, belum efektif dilakukan. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan inovasi dalam melakukan promosi wisata dan penyebaran informasi terkait Taman Renungan Bung Karno lewat kegiatan sosialisasi maupun seminar. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana prasarana pendukung seperti kamar mandi/toilet yang menjadi kebutuhan vital wisata, memperbaiki fasilitas Taman yang rusak, termasuk memperketat pengawasan di Taman.

Kata Kunci: Peran; Pelestarian situs sejarah; Pendapatan Asli Daerah; Pemerintah Daerah

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu lokus historis yang menandai babakan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada 28 Desember 1933, surat keputusan pengasingan Soekarno dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jonge, yang memutuskan diasingkannya Soekarno ke Kota Ende, Flores, NTT. Salah satu aktivitas Soekarno di Ende yaitu ritual kontemplasi di sebuah Taman yang tak jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Di bawah pohon sukun di Taman tersebut, Bung Karno

memperoleh gagasan atau inspirasi yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia: Pancasila. Kini, tempat itu dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno. Taman tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata yang mengamplifikasi banyak memori historis dalam konteks menyemai dan membangun nilai-nilai patriotisme masyarakat, khususnya bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang dengan motivasi menumbuhkan rasa cinta kepada Tanah Air. Kekultusan nilai-nilai nasionalisme itulah yang kemudian dijadikan sebagai obyek kegiatan promosi wisata di Kota Ende, NTT, selain memperkenalkan daerah Flores dan NTT ke masyarakat luas (Enjelina, 2018).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Sebagai salah satu aspek yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata perlu dikembangkan melalui peran pemerintah dalam pengelolaannya. Pemerintah bertanggung jawab pula menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata, sehingga memberikan utilisasi bagi masyarakat dalam hal informasi, budaya, ekonomi, pendapatan daerah/negara dan sebagainya (Ardilafiza et al., 2021; Medi, 2018).

Pelestarian situs bersejarah juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata daerah maupun negara (Anini & Benamar, 2023; Corbisiero & Urciuolli, 2023). Situs bersejarah memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, terutama mereka yang memiliki minat terhadap sejarah dan kebudayaan (Sutianto et al., 2023; Farid, 2020). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memelihara dan melestarikan situs bersejarah yang ada di wilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan potensi situs bersejarah sebagai objek wisata yang menghasilkan pendapatan (Sari et al., 2022; Wibowo & Darsono, 2022). Maka, diperlukan kebijakan tepat dalam menjaga dan melestarikan situs bersejarah serta memanfaatkannya sebagai objek wisata yang menghasilkan optimalisasi pendapatan.

Taman Renungan Bung Karno itu sendiri merupakan objek wisata sejarah yang sejauh ini memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Untuk masuk ke dalam Taman, pengunjung harus membayar biaya masuk (karcis) yang dikenakan 2.000/perorang. Pendapatan dari uang karcis Taman Renungan Bung Karno dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Periode Agustus 2022-Juli 2023

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Uang Karcis
1.	Agustus/2022	Rp. 8.500.000
2.	September/2022	Rp. 1.500.000
3.	Oktober/2022	Rp. 1.300.000
4.	November/2022	Rp. 1.250.000
5.	Desember/2022	Rp. 1.150.000
6.	Januari/2023	Rp. 400.000
7.	Februari/2023	Rp. 600.000
8.	Maret/2023	-
9.	April/2023	-
10.	Mei/2023	Rp. 400.000
11.	Juni/2023	Rp. 400.000
12.	Juli/2023	Rp. 800.000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Data di atas mengindikasikan penurunan pendapatan yang didapatkan dari kunjungan pengunjung ke Taman. Ini antara lain terjadi karena lemahnya nilai benefit yang menjadi penarik masyarakat mengunjungi wisata sejarah tersebut. Misalnya, kurangnya sarana prasarana dan penyalahgunaan fungsi taman yang seharusnya. Banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya menjaga kebersihan Taman. Sarana prasana yang ada di tempat tersebut juga sebagian besar kurang berfungsi baik.

Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menjaga dan merawat lokasi yang merupakan situs bersejarah tersebut agar ia sekaligus bisa menjadi obyek wisata sejarah serta memberikan optimalisasi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Menurut UU No. 23 Tahun 2014, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Termasuk di dalamnya terkait aspek perencanaan, pengelolaan, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang ditujukan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam pengembangan khususnya pelestarian objek wisata terdapat beberapa komponen peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (Pitana & gayatri, 2005). Peran tersebut yaitu: (1) Motivator, di mana peran pemerintah daerah sebagai Motivator dalam pengembangan pariwisata diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan, Sebagai entitas yang memiliki legitimasi atau otoritas dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, maka peran pemerintah sangat urgen di dalam memotivasi kepada segenap elemen atau sektor yang terkait dengan upaya mendukung berbagai kegiatan

peningkatan dan pengembangan potensi pariwisata yang ada di wilayah kekuasaannya. (2) Fasilitator, Peran Fasilitator merupakan peran pemerintah daerah sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya serta mengakselerasi pembangunan pariwisata melalui perbaikan ekosistem perilaku di daerahnya seperti: pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. (3) Dinamisator, Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator adalah memobilisasi sumber daya pembangunan yaitu dengan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan kepariwisataan daerah. Termasuk aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi pihak swasta dan masyarakat sendiri yang dilakukan secara terencana, sistematis, disertai proses pembimbingan yang intensif dan kontinu.

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya, situs sejarah dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya (UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya). Selain itu, konservasi perlu dilakukan sebagai usaha pelestarian agar situs sejarah tetap eksis.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, di mana semua data akan digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif untuk kemudian dianalisis secara mendalam mengenai suatu keadaan, fenomena dan situasi nyata (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini yaitu tentang bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Situs Sejarah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data Primer (data wawancara langsung dengan responden atau informan lapangan yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Masyarakat atau Pengunjung, Pemandu Wisata, dan Cleaning Service. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (kutipan literatur, melalui dokumen, buku buku, arsip, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya) yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan

kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Situs Sejarah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ende memiliki obligasi di dalam menjaga dan melestarikan Taman Renungan Bung Karno selain sebagai upaya pewarisan nilai-nilai luhur kebangsaan, juga untuk memberikan benefit bagi perekonomian daerah atau PAD. Peran Pemda dalam pelestarian Taman dimaksud dideskripsikan dalam aspek-aspek pengembangan terutama pelestarian pariwisata (Pitana & Gayatri, 2005) sebagai berikut:

Motivator

Pemerintah Kabupaten Ende sebagai motivator berupaya mengembangkan Taman Renungan Bung Karno sebagai obyek pariwisata sejarah sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende berupa festival parade pesona kebangsaan pada perayaan Hari Lahir Pancasila dan napak tilas perjuangan Bung Karno selama di Ende dengan sebaran titik strategis dan berujung di Taman Renungan Bung Karno. Kegiatan ritual tahunan yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat termasuk, generasi muda, wisatawan asing dan domestik ini ditujukan untuk memperkenalkan dan memperkuat penghormatan masyarakat terhadap artefak jejak pemikiran Soekarno. Selain itu juga menyediakan pusat informasi pariwisata, (brosur, website dan ada media sosial, newsletter maupun aplikasi di playstor) untuk memvibrasi pengenalan masyarakat akan Taman Renungan Bung Karno. Ini semua dilakukan untuk memberi informasi dan edukasi terkait makna dan fungsi situs sejarah Taman sebagai tempat sakral-historis. Di Taman ini terdapat sebuah pohon sukun cabang lima yang berada di sisi patung Bung Karno yang tengah duduk menghadap ke arah pantai atau pelabuhan Soekarno Ende. Di tempat inilah Soekarno menemukan 5 mutiara nilai yang inspiratif dan mampu mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang beragam. Testimoni ini kemudian disosialisasikan lewat media visual dan non visual termasuk lewat brosur-brosur yang diedarkan ke sekolah-sekolah terutama melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende untuk mendekatkan para siswa pada reminisensi pemikiran Soekarno.

Fasilitator

Peran Fasilitator yang dimaksud, sejauh mana Pemerintah Kabupaten Ende menyediakan fasilitas, sarana prasarana untuk menciptakan nilai tambah pariwisata (kenyamanan, eksklusif), terutama di Taman Renungan Bung Karno. Di Taman tersedian plaza dan *amphiteater* sebagai ruang aktivitas masyarakat untuk aktivitas yang terkait dengan pentas seni dan pertunjukan. Ada juga jalur pedestrian untuk kenyamanan jalan kaki pengunjung antara satu titik ke titik lainnya. Untuk keasrian Taman juga ditanam

pohon-pohon beringin sebagai kanopi natural sebagai pohon yang berfungsi peneduh terutama di saat musim panas sekaligus penyejukkan udara. Namun Pemerintah Daerah belum membangun fasilitas seperti kamar mandi dan toilet untuk pengunjung yang sejatinya sangat penting karena Taman tersebut merupakan tempat yang penting dan kaya makna historis dalam situs sejarah Indonesia. Alasannya semata-mata karena anggaran yang belum tersedia. Di sisi lain, nampak fasilitas yang ada mulai rusak seperti lampu taman, spot kolam bocor, dan ruangan berkaca yang pecah, tanpa ada upaya perbaikan dari pemerintah.

Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator merujuk pada upaya memobilisasi sumber daya pembangunan pariwisata dalam hal ini Taman Renungan Bung Karno yaitu dengan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam pelestarian Taman tersebut. Misalnya dalam bentuk seminar yang sering dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong masyarakat melestarikan situs sejarah Taman, termasuk menjadi Taman tersebut sebagai tempat kegiatan yang melibatkan masyarakat agar masyarakat paham tentang keberadaan, makna dan fungsi historis Taman. Hanya dari segi fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga situs sejarah dimaksud, belum ada pengerahan Satpol PP untuk menjaga Taman tersebut sehingga rawan terjadi kejahatan (perusakan, pencurian beberapa fasilitas seperti lampu taman) terutama di malam hari.

Faktor Penghambat Pelestarian Taman Renungan Bung Karno

1. Faktor Internal, berupa minimnya anggaran pengelolaan Taman membuat berbagai fasilitas, sarana/prasarana di Taman tidak terpelihara dengan baik. Selama ini sumber anggaran untuk operasional pemeliharaan Taman bertumpu pada uang hasil karcis masuk yang tidak seberapa jumlahnya dibanding kebutuhan operasional pemeliharaan fasilitas, termasuk untuk pengadaan petugas keamanan Taman yang nihil sampai detik ini.
2. Faktor Eksternal, berupa pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait makna reflektif sejarah Taman Renungan Bung Karno kemudian menjadikan Ende sebagai Kota Pancasila. Lahirnya pemikiran Bung Karno di Taman belum dipahami sebagai nilai sakral yang menuntun pada rasa bangga sekaligus rasa memiliki masyarakat terhadap Taman tersebut. Sehingga iktikad baik dan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga, memelihara dan melestarikan Taman Renungan Bung Karno sebagai aset sejarah tidak nampak. Tak sedikit fasilitas taman yang dirusak dan dicuri, termasuk keengganan menjaga kebersihan Taman tersebut.

KESIMPULAN

Peran pemerintah daerah dalam pelestarian situs sejarah di Taman Renungan Bung Karno belum efektif dilakukan baik sebagai motivator, fasilitator maupun dinamisator. Inovasi dan terobosan pemerintah daerah untuk mengadakan even-even penting (kegiatan seminar, sosialisasi) memperkenalkan Taman Renungan Bung Karno ke masyarakat luas perlu intensif dilakukan antara lain untuk menarik minat sponsor (swasta) dalam pembiayaan pelestarian Taman, selain tentunya menuntut pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk serius mengelola Taman dengan mengalokasikan anggaran pengelolaan dan pemeliharaan secara rutin, misalnya melengkapi fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan toilet, lampu penerangan, fasilitas kebersihan dan sebagainya. Dengannya, harapan agar Taman Renungan Bung Karno menjadi obyek pariwisata sejarah yang menginspirasi benih-benih nasionalisme-kebangsaan serta memberikan kontribusi bagi optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende, bisa terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anini, K., & Benamar, F. (2023). *Assessing Cultural Heritage Touristification: A Content Analysis of Rabat's Historical Site*.
- Ardilafiza, Warman, K., Illahi, B. K., & Tegnan, H. (2021). Ancient Sites, History and Local Wisdom: Tourism Boosting Reforms to Improve the Economy and Living Standard in the Province of Bengkulu, Indonesia. *Ancient Asia*, 12, 15. <https://doi.org/10.5334/aa.235>
- Ashworth, G., & Larkham, P. (Eds.). (2013). *Building A New Heritage (RLE Tourism)*. Routledge Library Editions: Tourism. (ePUB). Routledge.
- Corbisiero, D. F., & Urciuoli, C. C. (n.d.). *Tullio Romita Antonella Perri Philippe Clairay*.
- de Amorim, L.A., Sousa, B.B., Dias, Á.L. and Santos, V.R. (2022), "Exploring the outcomes of digital marketing on historic sites' visitor behaviour", *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-11-2021-0202>
- Enjelina, I. M. (2018). *Pengembangan Taman Renungan Bung Karno Sebagai Daya Tarik Wisata Sejarah Di Ende Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta).
- Farid, M. (2020). Pelestarian Warisan Sejarah Melalui Sinergi Antar-Stakeholder dan Digitalisasi Warisan Sebagai Model Pengembangan Pariwisata Banda Naira. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 44-58. <https://doi.org/10.51135/kambotivol1iss1pp44-58>
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Mechiat, S. and Dekoumi, D. (2023), "The heritage of historic villages: an asset for the development of cultural tourism (case of the Oued Labiod valley in the Aures, Algeria)", *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2022-0144>

- Medi, R., Yamin, M., & Sakawati, H. (2018). *Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata religi buntu burake di Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Pitana, I. Gede dan G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi offset
- Sari, S. R., Hilmy, M. F., Werdiningsih, H., & Hendro, E. P. (2022). The Development of Historic Tourism Strategies Based on Millennial Preferences: A Case Study of Semarang Old City, Semarang, Indonesia. *Millennial Asia*, 13(2), 360-375. <https://doi.org/10.1177/09763996211003397>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistyo, W. D., Khakim, M. N. L., Jauhari, N., Dewanti, M. A., & Setyawan, A. D. (2021). Implementasi Aplikasi Model Pembelajaran “Jelajah Situs Air Malang Raya” Untuk Menumbuhkan Kesadaran Sejarah Lokal dan Upaya Pelestarian Situs Sejarah bagi Siswa SMKN 2 Singosari. *Jurnal Artefak*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i1.4124>
- Tristantia, A., Yusuf, N., & Widodo, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Taman Renungan Bung Karno di Ende sebagai Sarana Pendidikan Karakter. *Paidea: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.56393/paidea.v1i1.90>
- Wibowo, B. A., & Darsono, D. (2022). Community-Based Tourism Design to Develop a Historical Tourism Village in Yogyakarta. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1286>